

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM POLDA

JAWA TENGAH (STUDI KASUS LAPORAN NOMOR:

LP/A/262/VII/2023/SPKT.DITNARKOBA/

POLDA JAWA TENGAH)



Bonaventura Stephen K. N.

19.C1.0130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM POLDA

JAWA TENGAH (STUDI KASUS LAPORAN NOMOR:

LP/A/262/VII/2023/SPKT.DITNARKOBA/

POLDA JAWA TENGAH)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum



Bonaventura Stephen K. N.

19.C1.0130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana pasti tidak lepas dari permasalahan hukum. Salah satunya yakni masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat sering terdengar. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di wilayah hukum Polda Jawa Tengah (studi kasus Laporan Nomor: LP/A/262/VII/2023/SPKT.DITNARKOBA/POLDA JAWA TENGAH).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Peran Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I berdasarkan Laporan Nomor: LP/A/262/VII/2023/SPKT.DITNARKOBA /POLDA JAWA TENGAH, yakni penyidik di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah sudah melakukan peranannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan, yakni dengan melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika, melakukan pemberkasan, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, dan tidak terdapat faktor penghambat secara internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I berdasarkan Laporan Nomor: LP/A/262/VII/2023/SPKT.DITNARKOBA/POLDA JAWA TENGAH.

Saran Penulis untuk Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, yakni harus bekerjasama dan berkordinasi dengan penyidik di Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan yang berwenang dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan saat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum, Polda Jawa Tengah